PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Jl. Merdeka Kota Bumi Mas Ampana 94683
website : www.tojounaunakab.go.id



KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) TA. 2025 ..... I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUPA TA. 2025 ..... I-3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUPA TA. 2025..... I-5
1.4. Sistematika I-9

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... II-19

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam Perubahan APBN..... III-1
3.2. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam Perubahan APBD..... III-3

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025 .. .. IV-1
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... IV-6

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja V-1
5.2. *Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja* Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer..... V-3

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII P E N U T U P

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sebagai respons atas dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama semester pertama tahun berjalan, sekaligus sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2029. RPJMD tersebut memuat visi daerah, yaitu *"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, sejahtera, berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan"*, yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan fiskal daerah secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Perubahan KUA 2025 disusun untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan realitas terbaru, termasuk capaian realisasi pendapatan dan belanja semester I, kondisi ekonomi makro nasional dan regional, serta dinamika sosial dan politik yang berkembang. Perubahan asumsi dasar seperti proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat dan provinsi, serta pembiayaan daerah, menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong revisi terhadap kebijakan umum dan plafon anggaran sementara.

Selain itu, perubahan KUA ini juga disusun dengan memperhatikan regulasi dan kebijakan nasional terbaru, seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang menekankan pentingnya pengendalian belanja aparatur, penguatan belanja produktif, serta optimalisasi program prioritas nasional. Pemerintah daerah juga merespons kebijakan sektoral lainnya, antara lain Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,

yang harus didukung dengan alokasi anggaran yang relevan dan terarah.

Lebih lanjut, penyesuaian KUA dilakukan untuk menjamin konsistensi antara dokumen penganggaran dan dokumen perencanaan tahunan seperti RKPD Tahun 2025, serta tetap sejalan dengan tujuan, sasaran dan indikator pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029, termasuk di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur yang merata dan kolaboratif, serta transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah seperti sektor kelautan, pertanian dan pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga menerapkan prinsip *evidence-based planning* dan *money follows program* dalam menyusun perubahan KUA, untuk memastikan bahwa pengalokasian anggaran benar-benar didasarkan pada hasil evaluasi kinerja, capaian indikator pembangunan, serta kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, perubahan KUA tidak hanya merupakan proses teknokratis dalam siklus penganggaran, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan strategis untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan *mempercepat pencapaian visi-misi kepala* daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sangat penting guna menjamin tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Tojo Una-Una.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dan arah prioritas pembangunan daerah dengan perkembangan aktual yang terjadi pada pelaksanaan APBD tahun berjalan. Proses ini dilakukan untuk menjamin keselarasan antara kebijakan penganggaran dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2029, serta sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang adaptif, responsif, dan akuntabel.

Secara lebih spesifik, tujuan dari penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan asumsi dasar ekonomi makro dan proyeksi keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, berdasarkan hasil realisasi semester pertama dan perkembangan terbaru perekonomian nasional dan regional.
2. Mengakomodasi perubahan kebijakan nasional dan daerah yang muncul setelah penetapan KUA awal, termasuk tindak lanjut atas regulasi nasional seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, serta penyesuaian terhadap kebijakan sektoral seperti penguatan koperasi desa/kelurahan dan program prioritas nasional lainnya.
3. Menyesuaikan rencana program dan kegiatan pembangunan dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak, pergeseran prioritas, serta hasil evaluasi kinerja pembangunan semester I yang menunjukkan perlunya realokasi atau refocusing anggaran.
4. Menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran tahunan dengan arah pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2025–2029, terutama dalam mendukung lima misi pembangunan daerah, seperti penguatan infrastruktur, peningkatan SDM, dan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan.

5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah melalui pendekatan *money follows program* dan *evidence-based planning*, sehingga anggaran daerah benar-benar diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan fiskal tahunan yang bersifat teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang dinamis dan memastikan bahwa pelaksanaan APBD tetap berada dalam koridor pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
20. Surat Edaran Nomor 500.3/2438/SJ Tentang percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6).
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran DaeraH Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 913);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025.

1.4 Sistematika

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

a. Latar belakang penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) TA. 2025
b. Tujuan penyusunan KUPA TA. 2025
c. Dasar Hukum penyusunan KUPA TA. 2025
d. Sistematika

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

a. Arah kebijakan ekonomi daerah
b. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

a. Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBN
b. Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

a. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025
b. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

a. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
b. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

VIII. PENUTUP

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan fiskal, khususnya dalam perumusan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025. Analisis kerangka ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah, baik yang bersifat historis, terkini, maupun proyeksi ke depan, guna mendukung perumusan kebijakan anggaran yang kredibel dan responsif.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyusun kerangka ekonomi makro daerah dengan mengacu pada sejumlah indikator utama seperti laju pertumbuhan ekonomi, struktur dan kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), *tingkat inflasi*, *tingkat pengangguran* terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan. Kerangka ini juga mempertimbangkan sinergi dengan kebijakan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 serta arah pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2029, yang menekankan pada transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una pada perubahan Anggaran Tahun 2025 dirancang untuk mewujudkan visi daerah 2025-2029 "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, sejahtera, berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan". Dalam rangka mencapai visi tersebut, kebijakan ekonomi diarahkan secara konsisten dengan Misi Keempat RPJMD 2025–2029, yaitu "Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan". Oleh karena itu, fokus pembangunan ekonomi difokuskan pada penguatan sektor unggulan lokal yang berbasis potensi daerah, seperti pertanian terpadu, perikanan tangkap dan budidaya,

pariwisata bahari dan alam, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan ini juga sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yakni "Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif". Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal melalui penguatan kelembagaan pelaku ekonomi, fasilitasi akses permodalan, pembukaan lapangan kerja, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi ekonomi, termasuk mendukung tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif.

Dalam konteks efisiensi belanja negara dan daerah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, arah kebijakan ekonomi juga mengedepankan optimalisasi anggaran belanja daerah untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Penyesuaian ini dilakukan melalui pengurangan belanja non-prioritas, percepatan kegiatan padat karya, serta penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Untuk *mempercepat transformasi ekonomi lokal yang adil dan* berkelanjutan, kebijakan juga diarahkan pada penguatan infrastruktur ekonomi, seperti akses jalan produksi, irigasi, pasar rakyat, serta sistem logistik daerah. Di samping itu, peningkatan investasi daerah difokuskan pada penyederhanaan perizinan, promosi potensi investasi berbasis wilayah. Dengan kebijakan ini, diharapkan kinerja ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una terus tumbuh secara berkualitas, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2024 dan awal tahun 2025.

2.1.1 Ekonomi Global

Kondisi ekonomi global pada tahun 2025 masih dibayangi oleh berbagai tantangan struktural dan geostrategis, meskipun sejumlah indikator menunjukkan arah pemulihan moderat pascapandemi dan berbagai krisis geopolitik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 berada pada kisaran 2,8–3,0 persen. Namun demikian, ketimpangan pertumbuhan masih terjadi antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara-negara berkembang di kawasan Asia menjadi motor utama pertumbuhan global, sementara negara maju seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa mengalami perlambatan akibat dampak pengetatan kebijakan moneter dan inflasi yang belum sepenuhnya terkendali.

Tantangan global semakin kompleks dengan adanya ketegangan geopolitik yang berkepanjangan di beberapa wilayah, seperti konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara barat, yang berdampak pada volatilitas harga energi dan pangan global. Selain itu, gangguan rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih dan risiko perubahan iklim yang semakin nyata menambah tekanan terhadap perekonomian dunia, terutama pada sektor-sektor sensitif seperti pertanian, transportasi, dan perdagangan internasional. Kebijakan transisi menuju ekonomi hijau (green economy) dan energi terbarukan juga mulai memperkuat dinamika perdagangan global dan investasi lintas negara, yang menuntut kesiapan negara dan daerah dalam beradaptasi dengan standar-standar baru global.

Kondisi ekonomi global ini turut memengaruhi perekonomian nasional dan daerah, termasuk Kabupaten Tojo Una-Una, melalui beberapa kanal transmisi utama seperti fluktuasi harga komoditas ekspor, tekanan nilai tukar, perubahan harga barang impor strategis (pangan, pupuk, dan energi), serta aliran investasi. Sebagai daerah yang sebagian besar perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan komoditas primer lainnya,

Kabupaten Tojo Una-Una perlu memperhatikan dampak dari volatilitas harga global terhadap pendapatan petani dan nelayan, serta daya beli masyarakat secara umum.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sebagai respons terhadap ketidakpastian global, melalui strategi diversifikasi ekonomi, penguatan sektor-sektor produktif berbasis sumber daya lokal, dan peningkatan nilai tambah produk. Selain itu, dorongan terhadap transformasi digital dan adopsi ekonomi hijau di tingkat lokal juga menjadi bagian dari upaya adaptasi terhadap perubahan paradigma ekonomi global. Kolaborasi dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan internasional menjadi semakin penting untuk membuka peluang pembiayaan, investasi, dan peningkatan kapasitas yang sesuai dengan arah perkembangan global saat ini.

2.1.2 Ekonomi Nasional

Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y) pada triwulan I tahun 2025. Meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan 5,11 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya, capaian ini mencerminkan ketahanan struktural ekonomi nasional, yang didorong oleh kekuatan sektor domestik. Pertumbuhan ekonomi ini terutama ditopang oleh sektor pertanian yang mencatat lonjakan signifikan hingga 10,52 persen, berkat peningkatan produksi padi dan jagung serta melonjaknya permintaan domestik menjelang Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, sektor makanan dan minuman, transportasi, serta informasi dan komunikasi juga mencatat pertumbuhan yang stabil dan positif.

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor barang dan jasa tumbuh solid sebesar 6,78 persen, didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas seperti lemak & minyak nabati, besi & baja, dan kendaraan. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara turut mendorong ekspor jasa. Namun, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 1,38 persen akibat normalisasi

belanja pasca Pemilu 2024. Investasi (PMTB) tumbuh sebesar 2,12 persen, mencerminkan kehati-hatian pelaku usaha dalam merespons ketidakpastian global.

Secara spasial, Pulau Jawa dan Sulawesi menjadi motor penggerak pertumbuhan nasional, masing-masing mencatat pertumbuhan 4,99 persen dan 6,40 persen. Pertumbuhan Sulawesi yang lebih tinggi dari rata-rata nasional mencerminkan peluang besar bagi wilayah ini, termasuk Kabupaten Tojo Una-Una, untuk memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional melalui pengembangan sektor unggulan daerah seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata.

Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 tercatat sebesar 4,76 persen, turun dari 4,82 persen pada Februari 2024. Meski demikian, jumlah penganggur secara absolut justru meningkat menjadi 7,28 juta orang akibat pertambahan angkatan kerja yang lebih cepat dari daya serap pasar kerja. Komposisi pekerja didominasi oleh pekerja penuh waktu (66,19 persen), namun proporsi pekerja informal juga meningkat dari 59,17 persen menjadi 59,40 persen, menandakan tantangan dalam penciptaan pekerjaan formal yang berkualitas.

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan perbaikan signifikan, dari 0,447 pada tahun 2023 menjadi 0,421 pada tahun 2024, mencerminkan penurunan ketimpangan gender sebesar 5,82 persen. Perbaikan ini terlihat dari meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan, berkurangnya kesenjangan representasi legislatif, dan membaiknya akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi. Namun, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan, terutama di wilayah timur Indonesia termasuk beberapa bagian Sulawesi.

Kondisi makro ekonomi nasional yang stabil namun penuh tantangan ini menjadi dasar bagi Kabupaten Tojo Una-Una dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan mengacu pada visi Kabupaten tahun 2025–2029, yakni "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, sejahtera, berbasis sektor unggulan

yang berkelanjutan," maka sinergi kebijakan pusat dan daerah perlu terus diperkuat. Terutama dalam mendorong produktivitas sektor unggulan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah secara berkeadilan.

2.1.3 Ekonomi Sulawesi Tengah

Perekonomian Sulawesi Tengah pada Triwulan I tahun 2025 mengalami pencapaian yang menggembirakan dengan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang signifikan. Berdasarkan PDRB atas harga berlaku, ekonomi Sulawesi Tengah tercatat mencapai Rp 95.768,30 miliar, sementara berdasarkan PDRB atas harga konstan 2010, tercatat sebesar Rp 53.024,71 miliar. Angka ini mencerminkan fondasi ekonomi yang cukup kuat meskipun di tengah tantangan global.

Dari sisi pertumbuhan tahunan (y-on-y), ekonomi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan yang menggembirakan sebesar 8,69 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi ini adalah Industri Pengolahan, yang tercatat mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 15,12 persen. Hal ini menunjukkan keberlanjutan dan penguatan sektor industri, yang didorong oleh peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi di sektor-sektor hilirisasi industri, terutama di kawasan industri berbasis tambang.

Selain itu, sektor ekspor barang dan jasa juga mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 11,97 persen. Pertumbuhan ekspor ini didorong oleh peningkatan permintaan global terhadap komoditas unggulan Sulawesi Tengah, khususnya nikel, hasil pertanian, dan produk perikanan. Peran sektor ekspor menjadi kunci dalam memperkuat perekonomian daerah, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB.

Namun, dari sisi pertumbuhan kuartalan (q-to-q), perekonomian Sulawesi Tengah mengalami konstraksi sebesar 6,03 persen, yang

menunjukkan adanya penurunan dalam aktivitas ekonomi antara Triwulan I-2025 dan Triwulan IV-2024. Salah satu sektor yang mengalami penurunan terdalam adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yang mengalami kontraksi sebesar 24,04 persen. Hal ini berhubungan dengan pengurangan belanja pemerintah yang terjadi pada awal tahun, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran negara dan daerah pasca periode pemilu.

Di sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga mengalami penurunan signifikan, yaitu 53,43 persen. Kontraksi ini dipengaruhi oleh normalisasi belanja pemerintah yang sebelumnya mengalami lonjakan besar pada tahun 2024 terkait dengan kegiatan pemilu. Penurunan ini menggambarkan efisiensi dalam belanja pemerintah daerah serta penyesuaian anggaran untuk alokasi yang lebih tepat sasaran pada program pembangunan yang lebih produktif.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kontraksi dalam sektor-sektor tertentu, perekonomian Sulawesi Tengah masih mencatatkan pertumbuhan yang solid pada Triwulan I-2025. Ke depan, penting untuk terus mengoptimalkan sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan, serta memperbaiki efisiensi pengeluaran pemerintah untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.1.4 Ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dan dengan periode waktu tertentu, jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah ditunjukkan dalam satuan rupiah.

Indikator pengukuran dengan PDRB dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung pada satu tahun tertentu, dan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selanjutnya, PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2020-2024 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.424,94	-0,65	1.475,21	3,53	1.507,24	2,17	1.530,91	1,57	1582,7	3,38
2	Pertambangan dan Penggalian	58,11	-25,02	59,13	1,76	61,69	4,33	64,14	3,96	60,25	-6,06
3	Industri Pengolahan	335,43	-0,28	337,64	0,66	337,55	-0,03	338,36	0,24	339,58	0,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,13	4,56	2,2	3,1	2,34	6,58	2,5	6,59	2,68	7,38
5	Pengadaan Air; Pengelolaan	6,79	5,61	7,02	3,41	7,19	2,49	7,49	4,16	7,52	0,35
6	Konstruksi	260,01	-18,98	274,1	5,42	293,87	7,21	305,48	3,95	306,78	0,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	328,34	-6,05	358,54	9,2	389,33	8,59	417,19	7,16	450,31	7,94
8	Transportasi dan Pergudangan	85,51	-30,18	88,83	3,89	109,49	23,26	118,28	8,03	127,36	7,67

No.	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,48	-10,76	27,72	13,24	30,54	10,17	33,07	8,28	36,33	9,88
10	Informasi dan Komunikasi	259,47	7,87	280,05	7,93	294,5	5,16	314,69	6,86	331	5,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	67,7	17,07	74,46	9,99	73,54	-1,24	73,62	0,1	83,26	13,1
12	Real Estat	164,26	0,24	166,27	1,22	174,97	5,23	185,06	5,77	188,31	1,76
13	Jasa Perusahaan	1,41	-0,39	1,45	2,18	1,51	4,63	1,6	5,76	1,6	0,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	297,69	1,17	311,85	4,76	309,25	-0,83	319,99	3,47	330,65	3,33
15	Jasa Pendidikan	236,02	-1,73	238,85	1,2	238,66	-0,08	246,36	3,22	257,25	4,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,63	3,22	128,76	5	132,89	3,21	137,05	3,13	142,39	3,9
17	Jasa Lainnya	45,68	-5,94	46,51	1,82	48,11	3,45	50,96	5,92	52,78	3,58
Pertumbuhan PDRB		**3.720,60**	**-3,17**	**3.878,59**	**4,25**	**4.012,69**	**3,46**	**4.146,74**	**3,34**	**4.300,77**	**3,71**

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2025

Dalam pembangunan ekonomi, fokus tujuan utamanya adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dengan diikuti distribusi yang semakin merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator pengukuran yang dijadikan sebagai acuan awal dalam menjelaskan kinerja ekonomi dalam lingkup sederhana.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2020, perekonomian mengalami kontraksi sebesar -3,17%, yang mencerminkan dampak signifikan pandemi terhadap berbagai sektor, terutama transportasi, perdagangan, serta jasa akomodasi dan makanan-minuman. Pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat serta berkurangnya investasi di beberapa sektor utama.

Namun, pada tahun 2021, perekonomian mulai bangkit dengan pertumbuhan mencapai 4,25%, menandakan pemulihan yang cukup cepat. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan, transportasi, serta sektor jasa yang mulai beradaptasi dengan kondisi pasca-pandemi. Meskipun demikian, pada tahun 2022 dan 2023, laju pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit perlambatan, masing-masing sebesar 3,46% dan 3,34%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemulihan terus berlanjut, masih terdapat tantangan seperti kenaikan harga bahan pokok, ketidakpastian ekonomi global, serta terbatasnya investasi di sektor strategis.

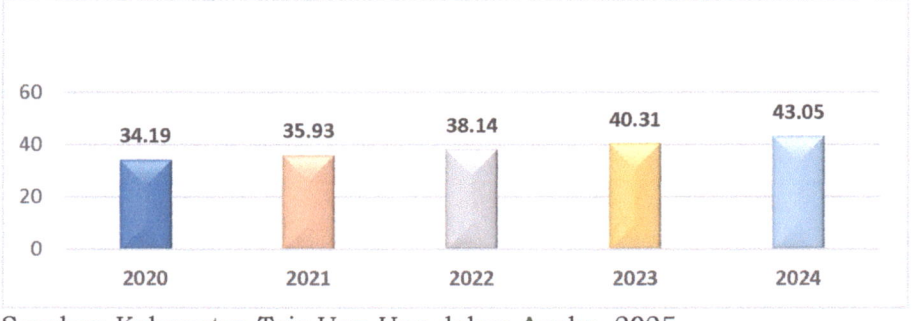
Pada tahun 2024, ekonomi Tojo Una-Una diproyeksikan tumbuh sebesar 3,71%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang lebih kuat, didukung oleh perbaikan di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi Tojo Una-Una cenderung stabil di kisaran 3,3% - 4,2% dalam beberapa tahun terakhir. Dengan strategi yang tepat, seperti peningkatan investasi di sektor produktif dan optimalisasi potensi lokal, diharapkan ekonomi daerah dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan di masa mendatang.

Untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu wilayah dalam periode tertentu salah satu indikator pengukurnya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dengan kurun waktu tertentu.

B. PDRB Perkapita

PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Tojo Una-Una. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Gambar 2.1
PDRB per Kapita Tahun 2020-2024 (Rp.Juta)



Sumber: Kabupaten Tojo Una-Una dalam Angka, 2025

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang ditampilkan dalam diagram diatas, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 34,19, kemudian meningkat menjadi 35,93 pada tahun 2021, 38,14 pada tahun 2022, 40,31 pada tahun 2023, dan mencapai 43,05 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif di wilayah tersebut.

Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, efektivitas kebijakan pembangunan, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja dan infrastruktur. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata kemungkinan berkontribusi terhadap peningkatan PDRB per kapita, terutama jika terjadi diversifikasi ekonomi yang lebih luas dan peningkatan nilai tambah dalam produksi lokal. Selain

itu, kebijakan fiskal dan alokasi anggaran daerah yang tepat sasaran juga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun tren ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai distribusi manfaat dari peningkatan PDRB per kapita ini. Jika pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu, maka ketimpangan ekonomi dapat meningkat, yang berpotensi memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, selain memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, terutama bagi kelompok ekonomi yang lebih rentan. Upaya seperti penguatan sektor UMKM, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur di daerah terpencil dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di masa mendatang.

C. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka inflasi dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari

bulan Januari sampai dengan bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Gambar 2.2
Laju Inflasi Tahun 2020-2024



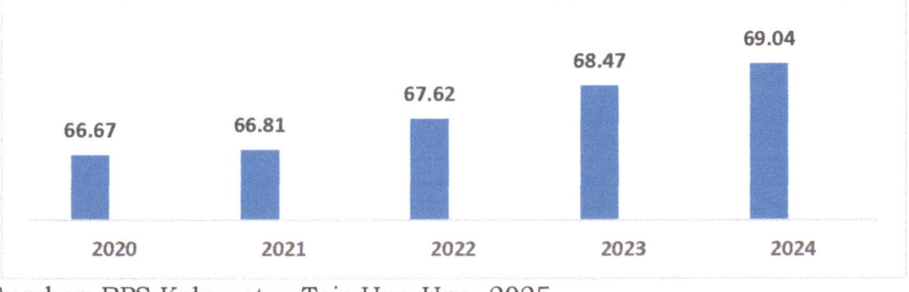
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Pada Desember 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 1,40 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,93. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,34 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,48 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,05 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,16 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 5,24 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,31 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,82 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,36 persen; kelompok transportasi sebesar 0,35 persen.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Tojo Una-Una terus mengalami kemajuan. IPM Tojo Una-Una meningkat dari 64,52 pada tahun 2019 menjadi 66,39 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Tojo Una-Una rata-rata tumbuh sebesar 0,08 per tahun.

Gambar 2.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2025

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditampilkan, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 66,67 dan mengalami kenaikan menjadi 66,81 pada tahun 2021. Peningkatan ini terus berlanjut dengan nilai 67,62 pada tahun 2022, 68,47 pada tahun 2023, dan mencapai 69,04 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan sebesar 2,37 poin dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Peningkatan IPM ini kemungkinan didorong oleh beberapa faktor utama, seperti meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan, bertambahnya angka harapan hidup, meningkatnya rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah, serta pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan peningkatan daya beli masyarakat. Faktor-faktor ini

menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, peran kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan dasar, seperti program pendidikan gratis, peningkatan fasilitas kesehatan, serta dukungan terhadap ekonomi lokal melalui UMKM dan industri kreatif, juga dapat menjadi faktor pendorong utama. Meskipun IPM menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir, tantangan struktural dalam pembangunan manusia tetap harus diperhatikan agar pertumbuhan ini dapat berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberlanjutan kebijakan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan menjadi kunci dalam mendorong IPM yang lebih tinggi dan mempercepat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Kemiskinan

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una berfluktuasi mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2023 merupakan kenaikan tertinggi selama lima tahun terakhir Dimana jumlah penduduk

miskin tahun 2023 sebesar 26.510. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

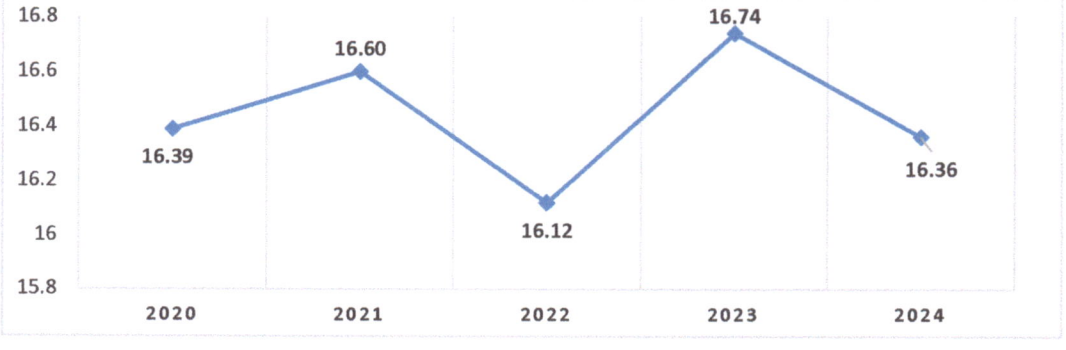
Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2024
Di Kabupaten Tojo Una-Una



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2025

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kegunaan angka ini adalah untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Gambar 2.5
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2024
Di Kabupaten Tojo Una-Una



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2025

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una dari 16,74% pada tahun 2023 menjadi 16,36% pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Penurunan sebesar 0,38 poin persentase ini mencerminkan perbaikan dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang didukung oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 3,37% menjadi 3,69%, yang menunjukkan adanya ekspansi sektor ekonomi dan peningkatan aktivitas produktif. Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita dari Rp40,31 juta menjadi Rp43,05 juta mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin.

Faktor lain yang turut berperan dalam menekan angka kemiskinan adalah penurunan tingkat pengangguran dari 2,83% menjadi 2,47%, yang menunjukkan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak penduduk yang mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih stabil, sehingga risiko jatuh ke dalam kemiskinan dapat dikurangi. Selain itu, penurunan ketimpangan pendapatan dari 0,262 menjadi 0,244 juga menunjukkan distribusi ekonomi yang lebih merata, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh berbagai lapisan masyarakat.

Namun, meskipun tren ini menunjukkan perbaikan, angka kemiskinan pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, yang sebelumnya mencapai 16,12%. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengentasan kemiskinan masih cukup besar, terutama dalam menghadapi faktor-faktor eksternal seperti inflasi, ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta ketahanan ekonomi masyarakat terhadap perubahan kondisi global dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih berkelanjutan, seperti penguatan sektor ekonomi berbasis lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja, serta optimalisasi program

perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data, diharapkan tren penurunan angka kemiskinan dapat lebih stabil dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una dapat terus meningkat.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2025 dalam perubahan anggaran disusun untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Beberapa kebijakan utama yang akan diterapkan mencakup efisiensi belanja, optimalisasi penerimaan daerah, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendukung pencapaian prioritas pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja, kebijakan perubahan anggaran tahun 2025 akan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini menekankan pentingnya pengendalian belanja yang tidak efisien, dengan mengurangi pengeluaran yang tidak langsung berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan. Fokus utama akan diberikan pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Belanja rutin yang tidak produktif akan diminimalkan, dan anggaran akan dialokasikan untuk program-program yang dapat memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini akan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/435/SJ Tahun 2024 tentang Peningkatan Efisiensi Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025, yang menekankan pada pengurangan pemborosan anggaran dan peningkatan kualitas belanja daerah. Setiap program dan kegiatan yang dianggarkan akan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam hal pengelolaan keuangan, kebijakan perubahan anggaran akan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan anggaran daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan memperkuat pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan anggaran. Proses pengelolaan anggaran daerah akan dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mempercepat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, serta menjaga kestabilan fiskal di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2025-2029, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sektor unggulan daerah.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 difokuskan pada penguatan sumber penerimaan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan efisien. Pendapatan daerah yang cukup dan stabil sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang telah direncanakan, serta memastikan kapasitas fiskal daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 akan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menggarisbawahi pentingnya penguatan potensi penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi. Salah satu langkah utama adalah memperbaiki sistem pemungutan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah dengan cara yang lebih efisien, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi akan mempermudah pelaporan dan pemantauan, serta meningkatkan transparansi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga akan memperhatikan potensi sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Kebijakan ini akan mendukung pemanfaatan potensi tersebut secara optimal, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata akan dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah-langkah yang diambil termasuk penguatan promosi dan pemasaran sektor pariwisata, pengembangan produk unggulan daerah, serta peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan.

Di samping itu, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/435/SJ Tahun 2024 juga menekankan pentingnya pengelolaan penerimaan daerah secara efisien dan akuntabel. Hal ini mencakup

pengawasan terhadap potensi penerimaan daerah yang belum tergarap maksimal, seperti pajak dan retribusi, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi lokal yang ada.

Selain optimalisasi pajak daerah dan sektor ekonomi unggulan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga akan menjajaki peluang kerjasama dengan pihak swasta maupun lembaga lain dalam rangka mendukung pembiayaan bersama untuk beberapa proyek infrastruktur besar yang membutuhkan pendanaan. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pembiayaan pembangunan, tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Arah kebijakan pendapatan daerah ini juga akan dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan, pencatatan, dan pelaporan *pendapatan daerah dilakukan secara profesional dan sesuai* dengan standar yang berlaku.

Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai realisasi, anggaran dan proyeksi pendapatan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		
		SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**69,901,107,490.00**	**90,257,670,393.00**	**20,356,562,903.00**
4.1.01	Pajak Daerah	11,446,000,000.00	22,324,822,403.00	10,878,822,403.00
4.1.02	Retribusi Daerah	4,692,607,490.00	7,803,347,990.00	3,110,740,500.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50,762,500,000.00	55,129,500,000.00	4,367,000,000.00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,183,120,225,611.00**	**1,147,873,472,045.00**	**(35,246,753,566.00)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,154,686,406,000.00	1,085,104,358,425.00	(69,582,047,575.00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28,433,819,611.00	62,769,113,620.00	34,335,294,009.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8,279,772,830.00**	**8,211,506,339.00**	**(68,266,491.00)**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8,279,772,830.00	8,211,506,339.00	(68,266,491.00)
	Jumlah Pendapatan	**1,261,301,105,931.00**	**1,246,342,648,777.00**	**(14,958,457,154.00)**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2025

Berdasarkan data pada tabel perubahan pendapatan di atas jenis pendapatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp 90.257.670.393,-**, meningkat sebesar **Rp 20.356.562.903,-**. Kenaikan ini mencerminkan optimisme dan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi seluruh potensi penerimaan daerah. Secara umum, tren ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola pendapatan, efisiensi belanja, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan yang perlu terus diperkuat di tahun-tahun mendatang.

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   Penyesuaian alokasi dana transfer pemerintah pusat kepada daerah Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah, yang disusun sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN

dan APBD. Kebijakan ini menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mendorong harmonisasi belanja pemerintah dalam mendukung prioritas nasional. Penyesuaian transfer ke daerah mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, serta Dana Insentif Fiskal (DIF), yang dilakukan berdasarkan sejumlah parameter kunci seperti kinerja pengelolaan keuangan daerah, tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal, kualitas pelayanan publik, ketepatan waktu pelaporan, serta dukungan terhadap program prioritas nasional seperti pengendalian inflasi, penurunan stunting, dan peningkatan investasi daerah.

3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

   Penyesuaian Pendapatan Transfer Antar Daerah Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari PKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan Pajak Rokok.

2.2.2 Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan dampak yang nyata bagi masyarakat, kebijakan belanja daerah akan difokuskan pada pemotongan belanja yang tidak produktif dan pengalihan alokasi anggaran ke sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan arahan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Salah satu prinsip utama dalam kebijakan belanja daerah tahun 2025

adalah peningkatan efisiensi belanja melalui pengendalian dan pengurangan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik dan prioritas pembangunan. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/435/SJ Tahun 2024 menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja, di mana setiap alokasi anggaran akan didasarkan pada hasil yang ingin dicapai dari masing-masing program dan kegiatan. Alokasi belanja akan difokuskan pada sektor-sektor yang mendukung program-program utama dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, belanja rutin yang tidak produktif dan tidak mendukung tujuan pembangunan jangka panjang akan diminimalkan. Pemotongan terhadap belanja operasional yang tidak efisien dan pengalihan dana ke sektor yang lebih strategis akan dilakukan secara bertahap. Salah satu sektor yang akan menjadi prioritas adalah sektor infrastruktur, yang menjadi tulang punggung untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Kebijakan belanja daerah juga akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Belanja pada sektor ini akan difokuskan pada program-program yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam pengelolaan belanja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah akan menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan belanja dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Seluruh kegiatan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan belanja daerah harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, di mana setiap alokasi dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi dengan jelas.

Kebijakan belanja daerah juga akan diselaraskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan efisiensi dalam belanja pemerintah. Dalam konteks ini, pengurangan belanja yang tidak mendukung pencapaian target pembangunan dan pengalihan dana untuk program prioritas akan dilakukan dengan cermat, agar dapat mencapai sasaran pembangunan dengan menggunakan anggaran yang terbatas secara maksimal.

Dengan pendekatan yang lebih efisien dan terfokus pada sektor-sektor prioritas, diharapkan kebijakan belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong kemajuan ekonomi daerah secara inklusif dan merata.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi proyeksi belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**855,414,663,867.37**	**979,625,967,979.30**	**124,211,304,111.93**
5.1.01	Belanja Pegawai	534,035,718,447.49	615,401,501,356.26	81,365,782,908.77
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306,960,620,594.88	343,407,090,798.04	36,446,470,203.16
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	0.00	-
5.1.04	Belanja Subsidi	250,000,000.00	250,000,000.00	-
5.1.05	Belanja Hibah	13,487,884,825.00	19,939,145,825.00	6,451,261,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	680,440,000.00	628,230,000.00	(52,210,000.00)
5.2	**BELANJA MODAL**	**153,983,327,895.63**	**118,257,489,348.60**	**(35,725,838,547.03)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.00	5,091,200,000.00	5,091,200,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,967,353,125.63	24,625,136,753.60	12,657,783,627.97
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,359,934,770.00	34,053,043,725.00	(6,306,891,045.00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75,362,160,000.00	43,183,301,120.00	(32,178,858,880.00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24,813,880,000.00	1,304,807,750.00	(23,509,072,250.00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,480,000,000.00	10,000,000,000.00	8,520,000,000.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**66,394,803,701.00**	**23,709,597,967.00**	**(42,685,205,734.00)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	66,394,803,701.00	23,709,597,967.00	(42,685,205,734.00)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**193,208,310,467.00**	**183,327,934,000.00**	**(9,880,376,467.00)**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,550,000,000.00	2,718,460,000.00	1,168,460,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191,658,310,467.00	180,609,474,000.00	(11,048,836,467.00)
	Jumlah Belanja	**1,269,001,105,931.00**	**1,304,920,989,294.90**	**35,919,883,363.90**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2025

Selain aspek teknis penganggaran, kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD 2025 juga harus mempertimbangkan tantangan ekonomi global dan nasional, termasuk potensi perlambatan ekonomi, inflasi, serta ketahanan fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menyusun strategi penganggaran yang fleksibel dan adaptif, dengan mengutamakan pengeluaran yang mendukung stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi faktor penting dalam mendukung kebijakan belanja yang lebih mandiri, dengan mendorong inovasi dalam pengelolaan aset daerah dan kolaborasi dengan sektor swasta.

Adapun kebijakan belanja daerah yang perlu diperhatikan dalam perubahan anggaran tahun 2025 meliputi:

1. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan visi, misi, dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih.
2. Integrasi program prioritas nasional, seperti Program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD dan APBD Perubahan tahun 2025.
3. Melakukan review anggaran belanja untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan APBD Perubahan tahun 2025.
4. Mengidentifikasi dan mengurangi atau menghapus belanja yang kurang prioritas atau tidak mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Memfokuskan belanja daerah pada program dan kegiatan strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Melakukan *pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap* pelaksanaan anggaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya digunakan untuk penyertaan modal daerah dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit, sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada perubahan Anggaran Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00	56,440,930,994.00	46,440,930,994.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,000,000,000.00	56,440,930,994.00	46,440,930,994.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10,000,000,000.00	56,440,930,994.00	46,440,930,994.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	0.00
	Pembiayaan Netto	7,700,000,000.00	54,140,930,994.00	46,440,930,994.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2025

Kebijakan pada pembiayaan netto yang merupakan SiLPA dari anggaran sebelumnya yaitu tahun 2024 digunakan untuk memenuhi peningkatan belanja operasi untuk mendanai program kegiatan dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan SILPA, dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
b. Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
c. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik yang masih sarat ketidakpastian. Di tingkat global, tekanan geopolitik, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta arah kebijakan moneter Amerika Serikat dan negara maju lainnya turut mempengaruhi kondisi ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia merespon hal ini dengan kebijakan fiskal yang adaptif namun tetap konsisten mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah telah menyepakati sejumlah asumsi makro sebagai dasar penyusunan Perubahan APBN 2025, yang menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Tojo Una-Una, dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja daerah secara lebih realistis.

Asumsi dasar makro ekonomi dalam Perubahan APBN Tahun 2025 meliputi pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan tetap berada di angka 5,2 persen. Meskipun tekanan eksternal meningkat, pertumbuhan ini didukung oleh membaiknya konsumsi domestik, percepatan hilirisasi industri, serta peningkatan kinerja ekspor dan investasi. Inflasi nasional diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 2,2 hingga 2,6 persen, dengan titik tengah sebesar 2,5 persen, yang mencerminkan keberhasilan pengendalian harga bahan pokok dan energi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diasumsikan pada level Rp 16.000 per USD, dengan mempertimbangkan volatilitas global dan stabilitas domestik. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diasumsikan sebesar 7,0 persen, sedikit lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, menunjukkan adanya ruang

pelonggaran dalam kebijakan moneter dan iklim investasi. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) tetap dipatok pada level US$82 per barel, dengan proyeksi lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1.005 ribu barel setara minyak per hari.

Asumsi-asumsi ini berpengaruh besar terhadap perhitungan penerimaan negara dan alokasi transfer ke daerah. Defisit APBN Tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai sekitar Rp 616,2 triliun. Defisit ini akan dibiayai antara lain melalui pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp 85,6 triliun, serta penerbitan surat utang negara. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal dan mendorong belanja yang produktif dan efisien.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, asumsi dasar ini menjadi pijakan penting dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Asumsi tersebut akan mempengaruhi estimasi penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH), terutama dari sumber migas dan nonmigas. Stabilitas inflasi dan nilai tukar juga mempengaruhi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perencanaan belanja daerah, khususnya untuk program-program prioritas dalam RPJMD 2025–2029. Dengan memperhatikan kondisi fiskal nasional dan tantangan global, Pemerintah Daerah didorong untuk menyusun APBD Perubahan yang efisien, berbasis bukti (*evidence-based*) dan mengedepankan belanja produktif yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 disusun dengan memperhatikan dinamika ekonomi nasional dan daerah, proyeksi fiskal hingga akhir tahun, serta hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan semester pertama. Selain itu, penyusunan asumsi ini juga secara langsung merujuk pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025, yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan, serta penguatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Perubahan asumsi dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah tetap adaptif, realistis dan responsif terhadap tantangan aktual yang dihadapi.

Secara prinsip, asumsi dasar dalam Perubahan APBD 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2029, *dengan mengedepankan penguatan sektor unggulan daerah*, peningkatan pelayanan dasar, serta percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Asumsi pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan berada pada kisaran 3,69% hingga 5,0%, sejalan dengan proyeksi nasional yang menempatkan pertumbuhan pada 5,2%. Pertumbuhan ini mempertimbangkan tren pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan tahun politik, serta peran strategis sektor kelautan, pertanian dan pariwisata berbasis lokal sebagai *motor utama pertumbuhan ekonomi* daerah.

Sementara itu, laju inflasi daerah diasumsikan berada pada kisaran 2,5%–3,0%, mencerminkan sinergi pengendalian harga antara pemerintah daerah, TPID dan pelaku usaha, serta langkah-langkah konkret penguatan ketahanan pangan lokal yang diarusutamakan dalam RKPD Perubahan.

Asumsi nilai tukar rupiah mengikuti arah nasional yaitu sebesar Rp16.000/USD, sebagai dasar perhitungan belanja daerah yang terkait barang impor, bantuan keuangan pusat dan pengadaan barang bernilai tinggi. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disesuaikan berdasarkan realisasi semester I dan optimalisasi sumber penerimaan melalui intensifikasi pajak daerah, digitalisasi pelayanan, serta perbaikan tata kelola retribusi dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam hal belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengacu pada penajaman program prioritas dalam RKPD Perubahan 2025, dengan fokus pada program yang bersifat mandatory (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar), sekaligus memperhatikan keberlanjutan program prioritas RPJMD dan kesesuaian dengan tema pembangunan nasional tahun 2025, yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif." Dengan demikian, alokasi belanja disusun dengan pendekatan money follows program dan diarahkan pada belanja yang efisien, produktif, serta memiliki outcome yang jelas bagi masyarakat.

Dari sisi pembiayaan daerah, asumsi terkait penerimaan pembiayaan seperti SilPA Tahun Anggaran 2024, potensi pinjaman daerah, serta penyertaan modal daerah dikaji ulang berdasarkan proyeksi kas dan kondisi riil pelaksanaan anggaran. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tetap menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan, dengan memperhatikan rasio fiskal dan kapasitas fiskal daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 yang berlandaskan pada asumsi-asumsi tersebut tidak hanya memperkuat kesinambungan fiskal daerah, tetapi juga memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal ini menjadi kunci dalam mewujudkan arah pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMD 2025–2029, serta menjawab kebutuhan masyarakat yang tercermin dalam dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 secara tepat, terukur dan berorientasi pada hasil.

Tema pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 diarahkan pada ***"Memperkuat Fondasi Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan."*** Tema ini menjadi titik pijak dalam merancang prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, berdaya ungkit tinggi dan mampu menjawab tantangan serta menangkap peluang pembangunan yang berkembang secara dinamis. Penyusunan prioritas dilakukan melalui pendekatan teknokratik yang berbasis pada data, capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta analisis isu strategis dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2029.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 difokuskan pada lima prioritas utama, yaitu:

1. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

   Peningkatan daya saing SDM merupakan pilar utama dalam pembangunan jangka menengah. Strategi yang dijalankan mencakup perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMP, serta penguatan budaya literasi melalui pengelolaan perpustakaan yang inklusif. Pemerintah juga menargetkan peningkatan mutu satuan pendidikan dan daya saing lulusan daerah. Di bidang kesehatan, strategi diarahkan pada optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan sarana dan prasarana di puskesmas dan rumah sakit, serta pembudayaan pola hidup bersih dan sehat. Program strategis lainnya meliputi dukungan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan

penurunan stunting, penanggulangan gizi buruk balita, serta penguatan program Keluarga Berencana dalam mendukung kesejahteraan keluarga.

2. **Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Inklusif**

   Strategi pertumbuhan ekonomi diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif lokal. Upaya stabilisasi harga pangan dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah dan penguatan cadangan pangan daerah. Program peningkatan produksi dan ketersediaan pangan utama didukung oleh pembangunan sarana-prasarana pertanian dan perikanan serta penguatan kelembagaan petani/nelayan. Daya saing produk daerah ditingkatkan melalui fasilitasi kemasan, promosi dan perluasan pasar UMKM serta pengembangan industri kreatif berbasis kearifan lokal. Penguatan kapasitas pelaku usaha dan peningkatan iklim investasi juga menjadi agenda penting dalam mendorong pemerataan hasil pembangunan ekonomi.

3. **Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas**

   Pembangunan infrastruktur difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah dan akses layanan dasar. Strategi utama mencakup pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan dan drainase untuk membuka keterisolasian dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Penguatan transportasi umum. Selain itu, pengembangan aksesibilitas wilayah menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan.

4. **Penciptaan Kondisi Wilayah yang Kondusif, Berwawasan Lingkungan dan Tangguh Bencana**

   Kebijakan diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan daerah melalui peningkatan pelayanan publik di wilayah sesuai SPM, serta pencegahan dan mitigasi konflik sosial. Pemerintah daerah juga memperkuat ketentraman dan ketertiban umum, termasuk

pengawasan wilayah rawan. Di sisi lingkungan, program difokuskan pada pengelolaan sampah terpadu, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem strategis. Untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap bencana, strategi mencakup mitigasi risiko, rehabilitasi pasca-bencana dan pemulihan cepat berbasis komunitas serta sistem informasi bencana yang andal.

5. **Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel**
   Reformasi birokrasi menjadi titik sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja berbasis hasil melalui penguatan sistem pelaporan dan evaluasi pembangunan. Koordinasi lintas sektor diperkuat untuk efektivitas pelaksanaan program prioritas. Strategi pengawasan internal dan eksternal diperkuat untuk menjamin transparansi, efisiensi dan integritas keuangan daerah. Pelayanan publik diarahkan untuk lebih adaptif melalui pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan, serta inovasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis kebutuhan masyarakat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, mempercepat pengurangan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan wilayah, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan agenda nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang mengusung tema *"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif."* Sinkronisasi antara pusat dan daerah tercermin dalam kebijakan Kabupaten Tojo Una-Una yang turut mendukung penguatan ketahanan pangan dan energi lokal, pengembangan hilirisasi pertanian dan kelautan, transformasi digital di sektor pelayanan publik, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi rakyat. Di sisi lain, prioritas pembangunan juga diselaraskan dengan tema pembangunan

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi berbasis kawasan, penurunan kemiskinan ekstrem dan penguatan infrastruktur kewilayahan. Dengan perencanaan yang terintegrasi ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 dapat berlangsung secara lebih efektif, inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang religius, maju, adil dan sejahtera sebagaimana visi dalam RPJMD 2025–2029.

Sasaran pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2025 diarahkan pada pencapaian:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69-5,00 %
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 16,36-16,00 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,00-3,00 %
4. Indeks Pembangunan Manusia 69,04-70,00 Poin
5. Indeks Gini sebesar 0,200-0,300 Poin

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai respons terhadap dinamika fiskal semester pertama, ketidakpastian ekonomi global dan nasional, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Perubahan 2025. *Penyesuaian ini juga mempertimbangkan proyeksi* realisasi dan kapasitas riil pendapatan daerah, serta kebutuhan percepatan pencapaian target-target strategis dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2025–2029.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PAD dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan realisme anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami penyesuaian, baik karena peningkatan target dari hasil optimalisasi pajak dan retribusi daerah, maupun karena potensi perlambatan pada beberapa sektor yang terdampak oleh kondisi eksternal maupun kendala teknis operasional. Pemerintah daerah akan mengintensifkan strategi digitalisasi pemungutan pajak, optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan penguatan regulasi penunjang untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Pada komponen pendapatan transfer, kebijakan perubahannya mengacu pada perkembangan alokasi dari Pemerintah Pusat, termasuk perubahan dalam Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal (DIF), serta Dana Desa. Beberapa perubahan pagu transfer akan disesuaikan berdasarkan informasi terbaru dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri, termasuk kemungkinan adanya earmarking belanja sesuai kebijakan tematik nasional seperti pengurangan stunting, transformasi layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan

pangan dan energi. Pemerintah daerah juga mengantisipasi potensi penerimaan dari bantuan keuangan provinsi dan hibah dari lembaga lainnya untuk mendukung pembiayaan program prioritas tahun berjalan.

Dengan perubahan kebijakan pendapatan ini, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berupaya menjaga kesinambungan fiskal dan memastikan bahwa proyeksi pendapatan tetap memadai untuk mendukung pembiayaan program dan kegiatan strategis daerah. Prinsip anggaran berbasis kinerja dan money follows program menjadi dasar dalam penyesuaian pendapatan, sehingga belanja daerah tetap fokus pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD Perubahan 2025, terutama pada peningkatan daya saing SDM, percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan penyesuaian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan fiskal daerah. Penyesuaian ini dilandasi oleh evaluasi realisasi PAD semester I, dinamika ekonomi lokal, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD 2025–2029 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Perubahan Tahun 2025.

Kebijakan perubahan PAD diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan potensi penerimaan daerah. Pemerintah daerah fokus pada strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan tata kelola pendapatan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan dari jenis pajak utama seperti PBB-P2, BPHTB dan Pajak Reklame.

2. Digitalisasi proses pemungutan pajak dan pemutakhiran basis data wajib pajak.
3. Pelayanan perpajakan yang responsif, adil dan transparan.
4. Penyesuaian tarif retribusi berdasarkan evaluasi keekonomian dan kemampuan masyarakat.
5. Peningkatan pelayanan publik yang menjadi dasar pemungutan retribusi (pasar, kebersihan, perizinan dan jasa umum lainnya).
6. Mendorong OPD teknis melakukan inovasi layanan untuk meningkatkan penerimaan retribusi.
7. Optimalisasi kinerja dan kontribusi BUMD melalui perbaikan tata kelola dan penguatan model bisnis.
8. Mendorong BUMD agar lebih adaptif terhadap sektor strategis dan potensi lokal.
9. Identifikasi dan pemanfaatan aset idle milik daerah melalui kerja sama pemanfaatan (KSP), penyewaan, atau kemitraan.
10. Penguatan SDM pengelola PAD melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
11. Pengembangan sistem *e-monitoring* dan *e-payment yang terintegrasi.*
12. Penerapan aplikasi pelaporan mandiri oleh wajib pajak.
13. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan potensi kebocoran PAD.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una;
2) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una; dan

3) Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian.

b. Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari Pemerintah Pusat merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam konteks perencanaan perubahan pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025, dana transfer tetap menjadi komponen utama yang menopang struktur pendapatan daerah, khususnya dalam membiayai program-program prioritas sesuai RPJMD 2025–2029 dan RKPD Perubahan 2025.

Dana transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak maupun sumber daya alam. DAU bersifat block grant yang dialokasikan untuk pemerataan fiskal antar daerah, sementara DAK diarahkan untuk mendanai kegiatan spesifik yang sesuai dengan prioritas nasional dan urusan wajib daerah. Adapun DBH dialokasikan berdasarkan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor pertambangan, kehutanan dan perikanan. Dalam dokumen KUPA 2025, kebijakan terkait dana transfer diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya secara akuntabel, tepat sasaran dan sinergis dengan pembangunan daerah.

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Dana Transfer:

1. Melakukan revisi target penerimaan dana transfer sesuai dengan Pagu Alokasi Dana Transfer dalam Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan informasi sektoral kementerian teknis (untuk DAK Fisik dan Nonfisik).
2. Dana digunakan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah pengentasan stunting, pembangunan infrastruktur dasar, transformasi pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan pangan.

3. Sinkronisasi program DAK dengan kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional dan RPJMD.
4. Penyusunan proposal kegiatan secara tepat waktu dan berbasis perencanaan teknokratik.
5. Mendorong capaian indikator kinerja daerah yang menjadi basis penilaian Dana Insentif Fiskal (DIF).
6. Meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana transfer, sebagai prasyarat pencairan tahap selanjutnya.
7. Melakukan koordinasi aktif untuk mendapatkan informasi terkini dan peluang penambahan alokasi (misal: tambahan DAK, dana bantuan khusus, atau insentif fiskal).
8. Menyediakan laporan realisasi penggunaan dana transfer secara terbuka kepada publik dan DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban fiskal daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang mencakup penerimaan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025, komponen ini memiliki peran strategis sebagai pelengkap dalam struktur pendapatan daerah, khususnya dalam mendukung pembiayaan program prioritas yang tidak tertutupi dari PAD maupun transfer.

Sumber dari kelompok pendapatan ini antara lain meliputi pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta lain-lain penerimaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks perubahan tahun anggaran 2025, perencanaan dan proyeksi pada kelompok ini disesuaikan berdasarkan hasil realisasi semester I, serta konfirmasi dari sumber-sumber pemberi hibah, baik dari pemerintah provinsi, lembaga donor, maupun swasta.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Tojo Una-Una tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 1.261.301.105.931,-** diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp. 14.958.457.154,-** sehingga menjadi **Rp. 1.246.342.648.777,-.**

Adapun komposisi dari Target Perubahan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		
		SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**69,901,107,490.00**	**90,257,670,393.00**	**20,356,562,903.00**
4.1.01	Pajak Daerah	11,446,000,000.00	22,324,822,403.00	10,878,822,403.00
4.1.02	Retribusi Daerah	4,692,607,490.00	7,803,347,990.00	3,110,740,500.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50,762,500,000.00	55,129,500,000.00	4,367,000,000.00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,183,120,225,611.00**	**1,147,873,472,045.00**	**(35,246,753,566.00)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,154,686,406,000.00	1,085,104,358,425.00	(69,582,047,575.00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28,433,819,611.00	62,769,113,620.00	34,335,294,009.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8,279,772,830.00**	**8,211,506,339.00**	**(68,266,491.00)**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8,279,772,830.00	8,211,506,339.00	(68,266,491.00)
	Jumlah Pendapatan	**1,261,301,105,931.00**	**1,246,342,648,777.00**	**(14,958,457,154.00)**

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025;

Perubahan Pendapatan tersebut terutama berasal dari pos Pendapatan Transfer pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sejumlah **Rp. 1.183.120.225.611,-** diproyeksikan mengalami perubahan menjadi. **Rp. 1.147.873.472.045,-** atau diproyeksikan turun sebesar

Rp. 35.246.753.566,-. Pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar **Rp. 20.356.562.903,-** dan pada pos Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan turun sebesar **Rp. 68.266.491,-.**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Perubahan perencanaan belanja daerah dalam dokumen KUPA Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tojo Una-Una disusun untuk menjawab dinamika pelaksanaan anggaran tahun berjalan, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan aktual baik dari sisi pendapatan maupun kebutuhan pembiayaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap isu strategis.

Kebijakan perubahan belanja tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2025–2029, serta diselaraskan dengan tema RKPD Perubahan 2025, yaitu "Memperkuat Fondasi Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan." Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan APBD semester pertama, kemampuan riil pendapatan, dan pergeseran prioritas program/kegiatan strategis.

Arah dan Strategi Kebijakan Perubahan Belanja:

1. Penyesuaian alokasi belanja berbasis prioritas dan hasil evaluasi semester I, dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang telah berjalan.
2. Refocusing dan realokasi anggaran diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti:
   - Penurunan angka stunting dan peningkatan gizi anak.
   - Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
   - Penguatan program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
3. Efisiensi belanja operasional pemerintahan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam

pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, serta penekanan pada belanja produktif yang memiliki daya ungkit pembangunan.

4. Peningkatan kualitas belanja modal, terutama untuk mendukung konektivitas wilayah, infrastruktur dasar, layanan publik, serta pengembangan sentra produksi lokal dan kawasan pertumbuhan ekonomi.
5. Penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis prinsip *evidence-based planning* dan *money follows program*, untuk memastikan alokasi anggaran mendukung pencapaian indikator kinerja utama RPJMD dan target pembangunan daerah.
6. Pengendalian belanja yang bersifat tidak prioritas atau belum mendesak, seperti perjalanan dinas, pengadaan kendaraan dinas baru, serta kegiatan seremonial yang tidak langsung berkontribusi pada output pembangunan.
7. Sinkronisasi belanja daerah dengan belanja pusat dan provinsi, guna memperkuat kolaborasi program lintas pemerintahan serta menghindari duplikasi kegiatan.
8. Peningkatan efektivitas pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial, dengan memastikan bahwa sasaran penerima manfaat sesuai kriteria dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan kondisi aktual dan dinamika pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan penyesuaian terhadap rencana belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelarasan terhadap evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama, kemampuan riil pendapatan daerah, serta prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029 dan RKPD Perubahan Tahun 2025.

Perubahan belanja operasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran rutin pemerintah daerah, terutama yang mendukung pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Rasionalisasi belanja pegawai dan optimalisasi belanja barang dan jasa dilakukan untuk menghindari pemborosan, serta memastikan bahwa belanja operasional benar-benar mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kegiatan strategis daerah.

Sementara itu, perubahan belanja modal difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, seperti pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar termasuk jalan, jembatan, saluran irigasi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Prioritas belanja modal juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Penyesuaian ini mempertimbangkan pula kesiapan dokumen perencanaan teknis (DED), pengadaan lahan, dan waktu pelaksanaan.

Belanja tidak terduga disesuaikan untuk memberikan ruang fiskal yang cukup dalam rangka menghadapi situasi darurat atau kejadian tidak terduga seperti bencana alam, lonjakan inflasi, krisis pangan, maupun kedaruratan kesehatan masyarakat. Alokasi ini berfungsi sebagai instrumen

fleksibel yang dapat digunakan secara cepat dan tepat untuk penanganan keadaan luar biasa.

Adapun untuk belanja transfer, khususnya yang dialokasikan kepada pemerintah desa, dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan dana transfer pusat serta kebutuhan prioritas pembangunan desa. Penyesuaian ini juga mendukung integrasi antara program pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, pengendalian stunting, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi desa.

Secara keseluruhan, rencana perubahan belanja daerah tahun 2025 diarahkan agar lebih responsif, selektif, dan adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat, serta menjamin kesinambungan program prioritas dan pencapaian indikator pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2025–2029. Prinsip money follows program dan efisiensi anggaran tetap menjadi acuan utama dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada hasil.

Adapun Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**855,414,663,867.37**	**979,625,967,979.30**	**124,211,304,111.93**
5.1.01	Belanja Pegawai	534,035,718,447.49	615,401,501,356.26	81,365,782,908.77
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306,960,620,594.88	343,407,090,798.04	36,446,470,203.16
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	0.00	-
5.1.04	Belanja Subsidi	250,000,000.00	250,000,000.00	-
5.1.05	Belanja Hibah	13,487,884,825.00	19,939,145,825.00	6,451,261,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	680,440,000.00	628,230,000.00	(52,210,000.00)
5.2	**BELANJA MODAL**	**153,983,327,895.63**	**118,257,489,348.60**	**(35,725,838,547.03)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.00	5,091,200,000.00	5,091,200,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,967,353,125.63	24,625,136,753.60	12,657,783,627.97
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,359,934,770.00	34,053,043,725.00	(6,306,891,045.00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75,362,160,000.00	43,183,301,120.00	(32,178,858,880.00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24,813,880,000.00	1,304,807,750.00	(23,509,072,250.00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,480,000,000.00	10,000,000,000.00	8,520,000,000.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**66,394,803,701.00**	**23,709,597,967.00**	**(42,685,205,734.00)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	66,394,803,701.00	23,709,597,967.00	(42,685,205,734.00)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**193,208,310,467.00**	**183,327,934,000.00**	**(9,880,376,467.00)**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,550,000,000.00	2,718,460,000.00	1,168,460,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191,658,310,467.00	180,609,474,000.00	(11,048,836,467.00)
	Jumlah Belanja	**1,269,001,105,931.00**	**1,304,920,989,294.90**	**35,919,883,363.90**

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025;

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan keseimbangan fiskal daerah, kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk menjadi instrumen penyeimbang APBD *yang efektif dan akuntabel. Perubahan kebijakan* pembiayaan dalam KUPA 2025 mempertimbangkan perkembangan realisasi anggaran hingga semester pertama, potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024, kebutuhan program prioritas yang belum terbiayai, serta dinamika fiskal daerah dan nasional.

Secara umum, kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 mencakup dua sisi utama, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembiayaan Penerimaan

   Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 diarahkan sebagai instrumen penting untuk menutup defisit anggaran yang timbul akibat ketidakseimbangan antara rencana pendapatan dan belanja, sekaligus untuk mendukung kebutuhan belanja prioritas yang belum terdanai. Dalam konteks Perubahan APBD Tahun 2025, penerimaan pembiayaan difokuskan pada sumber-sumber yang sah dan tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan. Salah satu sumber utama penerimaan pembiayaan adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *SiLPA digunakan untuk menutup* kekurangan anggaran, membiayai program prioritas, serta mendukung kegiatan strategis yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda.
2. Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran:

   Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan melalui penyertaan modal

yang produktif, penguatan kelembagaan ekonomi daerah, serta pembiayaan kegiatan strategis yang tidak dapat didanai langsung melalui belanja murni. Salah satu bentuk utama pengeluaran pembiayaan adalah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PT. Bank Sulteng yang memiliki prospek usaha menjanjikan dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Penyertaan modal dilakukan secara selektif, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kelayakan usaha, tata kelola BUMD, serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik.

Selengkapnya mengenai Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.1.berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00	56,440,930,994.00	46,440,930,994.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,000,000,000.00	56,440,930,994.00	46,440,930,994.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10,000,000,000.00	56,440,930,994.00	46,440,930,994.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	0.00
	Pembiayaan Netto	7,700,000,000.00	54,140,930,994.00	46,440,930,994.00

Sumber: RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025;

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memastikan ketercapaian target dan sasaran prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan berdasarkan tema pembangunan: *"Memperkuat Fondasi Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan"*. Strategi ini disusun agar mampu mengoptimalkan efektivitas belanja daerah, mempercepat implementasi program prioritas, dan memperkuat daya ungkit APBD terhadap kinerja pembangunan yang terukur.

Dalam mendukung pencapaian prioritas pertama, yaitu ***Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia***, strategi diarahkan pada peningkatan kualitas belanja pendidikan dan kesehatan dengan fokus pada pelayanan dasar, percepatan penurunan stunting, serta penguatan program gizi dan perlindungan sosial. Upaya ini dilakukan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik, serta penguatan kemitraan lintas sektor.

Untuk mencapai prioritas kedua, yakni ***Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Inklusif***, strategi diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik serta Dana Desa, mendorong kolaborasi dengan swasta, serta memperkuat promosi produk lokal berbasis digital untuk membuka akses pasar.

Dalam rangka mendukung prioritas ketiga, yaitu ***Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas***, strategi difokuskan pada percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik desa, serta jaringan

internet). Penyusunan anggaran diarahkan pada proyek yang memiliki kesiapan teknis (DED) dan berpotensi meningkatkan konektivitas antarwilayah dan daya saing ekonomi lokal.

Terkait prioritas keempat, yaitu ***Penciptaan Kondisi Wilayah yang Kondusif, Berwawasan Lingkungan, dan Tangguh Bencana***, strategi yang diambil meliputi penguatan sistem mitigasi bencana berbasis desa, perlindungan lingkungan hidup, serta pengelolaan risiko perubahan iklim. Dukungan anggaran juga difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan energi yang adaptif terhadap krisis iklim.

Sedangkan untuk prioritas kelima, yakni ***Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel***, strategi diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan berbasis kinerja. Reformasi birokrasi dan transformasi digital didorong untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pedoman dalam merumuskan perubahan *arah kebijakan fiskal dan program prioritas* pembangunan daerah, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD semester I, perubahan asumsi ekonomi makro, kondisi riil capaian pembangunan, serta dinamika kebijakan nasional dan regional. Penyusunan KUPA ini juga dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029, RKPD Perubahan Tahun 2025, serta arah pembangunan Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Melalui penyusunan KUPA ini, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berkomitmen untuk mengarahkan belanja daerah secara lebih efektif, efisien, responsif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan kondisi keuangan daerah. KUPA ini juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas pembangunan tetap dapat dicapai secara optimal di sisa tahun anggaran, sehingga pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dokumen KUPA ini akan menjadi dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah daerah berharap agar dokumen ini mendapat persetujuan dan dukungan dari DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga seluruh proses penganggaran dapat berjalan dengan baik, tepat waktu dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.

Ampana, 4 September 2025

PIMPINAN DPRD
KETUA

GUSNAR A SULEMAN, SE.,MM

WAKIL KETUA

RISAL C. PANJILI, SE., MAP

WAKIL KETUA

JAFAR MUHAMAD AMIN, SE

BUPATI TOJO UNA-UNA

ILHAM